



DINAS PERIKANAN

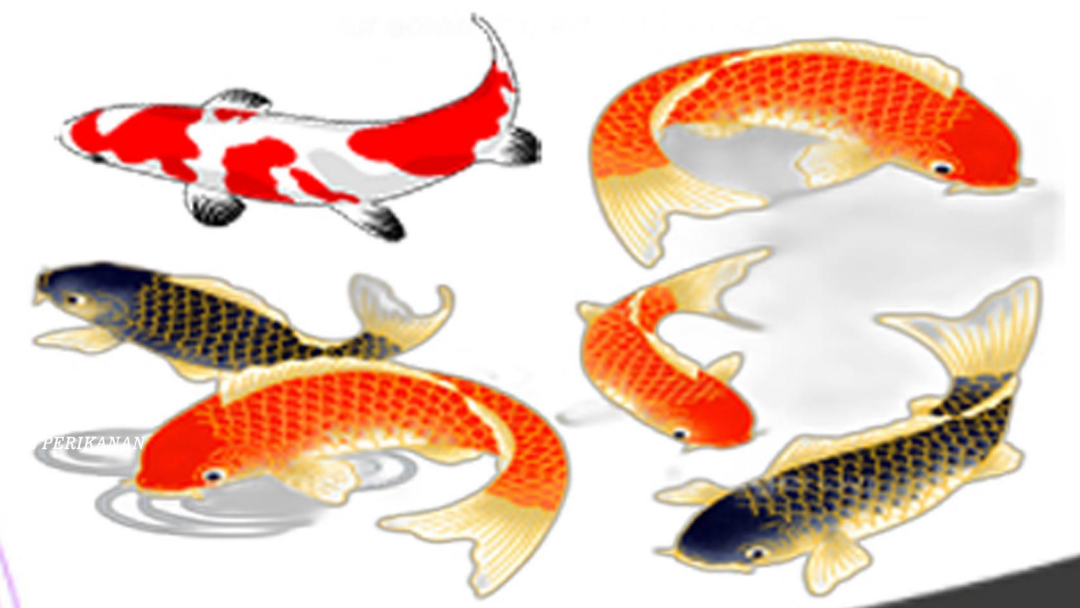


PEMERINTAH



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2021**



DINAS PERIKANAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas dan Wewenang	2
1.3. Isu – Isu Strategis	5
1.4. Permasalahan yang dihadapi	6
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PRENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan	9
2.1.1. Visi	9
2.1.2. Misi	11
2.1.3. Sasaran	12
2.2. Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2021	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN	14
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Targe Kinerja	14
3.2. Analisa dan Capaian Kinerja	14
3.3. Realisasi Anggaran	56
BAB IV. PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan	4
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan	4
Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi	6
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2021	14
Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1	15
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya	19
Tabel 3.4. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap	23
Tabel 3.5. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan	25
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias	28
Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah.....	31
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan	34
Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan	37
Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Jumlah Kelompok Perikanan	41
Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina Kelompok	46
Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan	51
Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2	53
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2021	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)	16
Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya	17
Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)	21
Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap	21
Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor/ Tahun)	24
Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih	24
Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)	26
Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan hias	27
Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor).....	30
Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun)	31
Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan	32
Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun)	35
Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan	36
Gambar 3.15. Jumlah Kelompok perikanan (Kelompok /Tahun)	39
Gambar 3.16. Kegiatan yang mendukung peningkatan kelompok Perikanan	41
Gambar 3.17. Persentase cakupan bina kelompok	43
Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan	44
Gambar 3.19. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu cara mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien secara bersih dan bertanggung jawab adalah melalui implementasi system akuntabilitas yang berorientasi kepada hasil dan manfaatnya bagi perbaikan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Semuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai dasar dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah,serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya Dinas Perikanan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk menyusun LKjIP Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penyusunan (LKjIP) Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota bertujuan sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota dalam mencapai target kinerja Tahun 2021, dan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

1.2. TUGAS DAN WEWENANG

a) Kedudukan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Dinas Perikanan mempunyai Tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Perikanan

- Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah / Perencanaan
- c. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 1. Analisis Akuakultur
 2. Pengelolaan Kesehatan Ikan
 3. Statistisi
- d. Bidang Perlindungan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Penggerak Swadaya Masyarakat
 2. Analis Pembiayaan dan Resiko Keuangan
 3. Analisis Ketahanan Pangan
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri dari:
 1. Pembinaan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan;
 2. Analisis Pasar Hasil Perikanan
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

d) SDM Pegawai /Aparatur

Jumlah aparatur Pemerintah di Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 sebanyak 55 orang yang terdiri dari 18 orang PNS, 2 orang CPNS dan 35 orang Tenaga Kontrak. Sebanyak 45 orang bertugas di Kantor Dinas Perikanan dan 10 orang bertugas di UPT Balai Benih Ikan. Penyuluh Perikanan yang berjumlah 14 Orang yang terdiri dari 7 orang Penyuluh PNS dan 7 Orang Penyuluh Perikanan Bantu berada dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan wilayah binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dari tingkat pendidikan aparatur Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	5 Orang	
2	Strata 1 (SI)	12 orang	
3	Diploma III (D III)	2 orang	
4	SMU	1 Orang	
Jumlah		20 Orang	

Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak Dinas Perikanan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	Strata 2 (S2)	-	
2	Strata 1 (SI)	12 Orang	
3	Diploma III (D III)	8 Orang	
4	SMA	11 Orang	
5	SD	4 Orang	
Jumlah		35 Orang	

1.3 ISU ISU STRATEGIS

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah di masa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Adapun isu-isu strategis dalam membangun dan memajukan bidang perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Penurunan kualitas lingkungan potensial budidaya ikan baik berupa alih fungsi lahan potensial budidaya
2. Belum optimalnya penggunaan benih ikan unggul serta penerapan metode CBIB dan CPIB bagi pembudidaya ikan sehingga masih ditemui adanya serangan hama penyakit ikan
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
4. Masih lemahnya kualitas kelembagaan bagi nelayan serta belum optimalnya kegiatan pemberian jaminan sosial bagi nelayan ataupun kegiatan pelatihan serta pembinaan
5. Kurangnya diversifikasi hasil olahan produk perikanan serta belum optimalnya penerapan standarisasi mutu pada hasil olahan produk perikanan
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan di masyarakat
7. Meningkatnya tuntutan akan produk perikanan yang aman bagi kesehatan manusia
8. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan pengelolaan sumber daya perikanan

9. Masih rendahnya jumlah kelompok perikanan yang aktif dan cakupan bina kelompok

1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan menghadapi permasalahan - permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya pada Tabel 1.3

Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Produksi dan produktivitas perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya yang unggul	1. Masih rendahnya jumlah luas lahan baru budidaya perikanan (skema investasi) 2. Masih rendahnya jumlah kolam baru yang dibangun 3. Masih sedikitnya jumlah bangsal pembenihan yang dibangun 4. Masih rendahnya jumlah jenis ikan lokal yang dibudidayakan 5. Masih sedikitnya jumlah obat-obatan ikan 6. Masih rendahnya jumlah demplot peningkatan kualitas air 7. Masih rendahnya jumlah pengujian sampel ikan 8. Masih rendahnya jumlah pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB dan CPIB 9. Masih rendahnya jumlah benih, calon induk dan pakan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			<p>yang didistribusikan</p> <p>10. Masih sedikitnya jumlah pembinaan teknis yang dilakukan</p>
		<p>2. Rendahnya Jumlah kelompok Perikanan yang Aktif</p>	<p>1. Masih sedikitnya jumlah pelatihan teknis</p> <p>2. Masih sedikitnya jumlah bimbingan Teknis</p> <p>3. Masih sedikitnya jumlah temu usaha perikanan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah rekomendasi usaha perizinan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah kelompok yang teregistrasi</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah kelompok yang dinilai</p>
		<p>3. Belum Optimalnya Produksi Tangkap dan Konsumsi Ikan</p>	<p>1. Masih rendahnya jumlah SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan)</p> <p>2. Masih rendahnya jumlah sarana dan prasarana perikanan</p> <p>3. Masih rendahnya jumlah asuransi pembudidaya ikan</p> <p>4. Masih rendahnya jumlah fasilitasi perlindungan usaha perikanan</p> <p>5. Masih rendahnya jumlah sosialisasi gemarikan</p> <p>6. Masih rendahnya jumlah angka konsumsi makan ikan</p> <p>7. Masih rendahnya jumlah</p>

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			promosi penguatan daya saing

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2021 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tugas dan Wewenang
- 1.3. Isu isu strategis
- 1.4. Permasalahan yang dihadapi
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 1.1. Rencana Strategis Dinas Perikanan
 - 1.1.1 Visi
 - 1.1.2 Misi
 - 1.1.3 Tujuan dan Sasaran
 - 1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan
- 1.2. Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja
- 3.2. Pengukuran Kinerja 2020
- 3.3. Analiis dan Capaian Kinerja
- 3.4. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Langkah Peningkatan di Masa Datang

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN

2.1.1 Visi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan dimasa mendatang. Untuk dapat mewujudkan kondisi imajiner tersebut, maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dinas daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal dinas daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembangunan daerah yang lebih luas.

Penyajian visi dan misi ini dalam dokumen perencanaan merupakan implementasi pendekatan politis dalam perencanaan pembangunan daerah disamping pendekatan lainnya, yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, serta atas bawah (Top-Down) dan bawah atas (Bottom-Top).

Sesuai dengan Undang-Undang di atas, maka Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi ini juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat. Hal ini

dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan daerah, propinsi dan nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak. Karena secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perikanan sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di sektor perikanan secara menyeluruh.

Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan, dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas / daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah.

Adapun Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2016-2021 adalah :

“Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Madani adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, mampu berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Beradat dan Berbudaya** adalah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang santun bertutur kata,

sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas. **Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah** adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

2.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat didefinisikan komitmen terbaik daerah terhadap stakeholder. Stakeholder utama pembangunan daerah adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) dan sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Upaya untuk mewujudkan visi menjadi Mewujudkan Lima Puluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah telah dirumuskan melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi Nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan Misi diatas, maka Dinas Perikanan dengan urusan Kelautan dan Perikanan termasuk ke dalam MISI 2 : **Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional**. Pada sasaran meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan, Dinas Perikanan berperan dalam pencapaian indikator persentase kontribusi sektor

perikanan terhadap PDRB dalam harga berlaku. Dalam melaksanakan Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota, Kepala Daerah menetapkan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Adapun Agenda Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Pengembangan Masyarakat Madani
2. Peningkatan Pembangunan IKK Sarilamak
3. Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi
4. Pengembangan Pertanian dan Perikanan Menuju Agrobisnis
5. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah

Selanjutnya program unggulan daerah dituangkan dalam 5 misi Kepala Daerah. Dinas Perikanan melalui Misi 2, Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral dengan program unggulan : Pembukaan lahan baru perikanan seluas 1.000 Ha dan menghasilkan 20 juta bibit ikan perbulan.

1.1.3. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

REVISI PENJANJIAN KINERJA

OPD : DINAS PERIKANAN

TAHUN ANGGARAN : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	Persentase Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya	3,66
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 619.473.700,-	
2	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 311.759.200,-	
3	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 3.217.871.525,-	
4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 704.664.200,-	

Pada Tahun 2021 Dinas Perikanan melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 54 Sub Keegiatandengan Pagu Anggaran **Rp. 7.324.604.310,-**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERIKANAN

3.1 METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Kinerja suatu instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi, strategi dari suatu instansi pemerintah yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 menyajikan hasil analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya produksi dan Produktifitas Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB-	3,55	3,66	103,10	Sangat tinggi
2)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perikanan	Nilai Evaluasi Hasil AKIP	75	67,79	90,39	Sangat tinggi

Rata rata Capaian indicator Kinerja sangat tinggi

3.2 ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Untuk mencapai sasaran strategis dan indicator kinerja Dinas Perikanan

mengalami perubahan anggaran yaitu anggaran awal berjumlah Rp. 8.279.199.363 yang tertulis di Penetapan Kinerja 2021, namun di perubahan Anggaran bertambah menjadi Rp. 7.324.604.310

Berikut gambaran pengukuran capaian kinerja masing-masing sasaran strategis berserta analisisnya :

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2021 belum mencapai target yakni 11 % dengan realisasi 9,96% yang dirilis oleh BPS. AngUntuk mendukung Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB ada beberapa Faktor yang bisa mendukung :

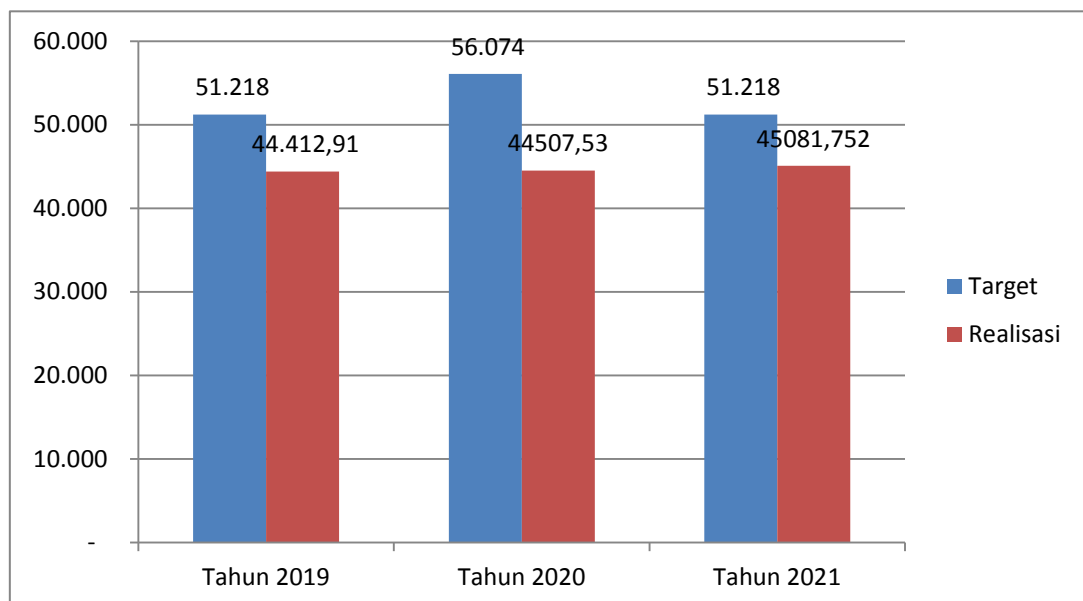
1) Tabel 3.2. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1							
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan							
Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB							
Faktor Pendukung	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi 2021
Produksi Budidaya (ton/thn)	51.218,40	44.412,91	56.073,83	44.507,53	51.218,40	45.081,752	88,02
Produksi Tangkap (ton/ha)	4.000	3.801,69	4.250	3.412,02	4.300	2.829,12	65,79
Produksi benih Ikan (ekor)	430.000.000	440.990.000	440.000.000	445.695.800	470.000.000	436.274.300	92,82
Produksi Ikan Hias	6.500.000	6.490.000	7.000.000	7.054.400	7.000.000	7.416.300	105,86
Produksi Produk Unggulan Daerah	300.000	372.000	350.000	452.000	450.000	736.500	163,67
Produksi hasil olahan	375	389,88	375	354.85	425	348,385	81,97
Tingkat Produktifitas Perikanan	4 Ton/ Ha	Ton/ Ha	5 Ton/ Ha	4,5 Ton/ Ha	6 Ton/Ha	4,5 Ton/Ha	75

Sasaran Strategis 1							
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Perikanan							
Jumlah Kelompok Perikanan (Kelompok)	615	619	650	638	737	666	290,37
Cakupan Bina Kelompok (%)	80	75	85	77	90	65	72,22
Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/ Kapita/ Tahun)	34 Kg/Kapita/ Tahun	35 Kg/Kapita/ Tahun	35 Kg/Kapita/ Tahun	38 Kg/Kapita/ Tahun	38,5 Kg/Kapita/ Tahun	39,24 Kg/Kapita/ Tahun	101,92

a. Produksi budidaya

Produksi Budidaya pada Tahun 2021 belum mencapai target yaitu 51.218,40 Ton dengan realisasi 45.081,752 Ton. Namun dibandingkan dengan Tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan produksi. Peningkatan produksi dapat di lihat dari Grafik :



Gambar 3.1. Grafik Produksi Budidaya (Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi setiap tahunnya mulai dari Tahun 2019 s.d 2021

Perikanan Budidaya adalah Usaha Memelihara dan Mengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Lokasi Budidaya perikanan bisa pada Kolam air Tenang, Kolam air Deras, Bak/ Drum, Saluran irigasi, Keramba sungai, keramba jaring apung

dan minapadi (memelihara ikan bersama padi). Kegiatan ini dilakukan oleh Pembudidaya ikan yang tergabung dalam kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) maupun secara perorangan. Di Kabupaten Lima Puluh Kota kegiatan paling banyak dilakukan pada Kolam air tenang, keramba sungai, KJA, Minapadi dan Saluran Irigasi.

Untuk meningkatkan Produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan sudah melakukan beberapa Kegiatan yaitu Pembinaan cara budidaya ikan yang baik, Bantuan Benih dan pakan Ikan untuk Pokdakan, Pengembangan Keramba Jaring apung, Pengembangan keramba sungai, rehap kolam Pokdakan, Bantuan mesin pellet ikan, Pembangunan Sumur Bor dan Pembangunan Saluran air masuk dan keluar di Pokdakan. Belum tercapainya target produksi perikanan Budidaya disebabkan oleh ketersediaan air tidak sepanjang musim pada kolam pokdakan karena banyak kolam masyarakat yang sistem tadah hujan, sistem budidaya yang masih tradisional, mahalnya harga pakan dan juga musibah banjir.

Gambar 2. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan budidaya







Tabel 3.3. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Budidaya

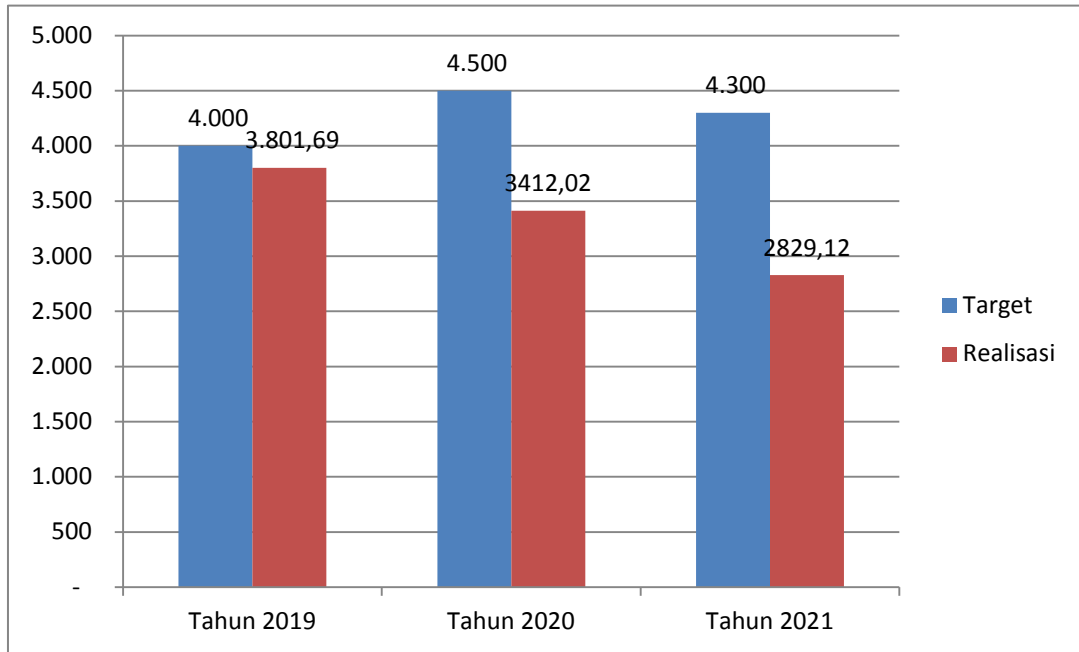
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100
	1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	900.363.100	897.811.425	99,72	100
	2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	547.421.700	542.790.320	99,15	100
	3) Penjaminan	5.786.900	5.786.900	100	100

	Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu				
4)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.523.725	42.154.150	99,13	100
5)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.400.000	13.400.000	100	100
6)	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.263.628.300	1.172.890.051	92,82	100
7)	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	46.701.800	45.981.800	98,46	100
	JUMLAH	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100

b. Produksi Tangkap

Untuk indikator jumlah produksi Perikanan tangkap yang dihasilkan pada tahun 2021 dari Target 4.300 ton masih jauh untuk mencapai target yaitu 2.829,12 ton. Dibandingkan pada Tahun 2020 dengan produksi 3.412,02 terjadi penurunan produksi.

Hal ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Gambar 3.3. Grafik Produksi Tangkap (Ton/Tahun)

Dari grafik diatas, terjadi penurunan produksi pada tahun 2021 . Hal ini disebabkan karena hanya sebagian kecil Nelayan Penuh sedangkan sebagian besar merupakan Nelayan sambilan (hobi). Untuk mendukung hal tersebut Dinas Perikanan pada tahun 2021 melakukan pengembangan Lubuk Larangan, memberikan bantuan Perahu dan sarana alat tangkap Nelayan seperti jaring dll serta melakukan Restocking di Perairan Umum.

Gambar 4. Dokumentasi yang mendukung kegiatan perikanan tangkap



Bantuan Perahu untuk KUB



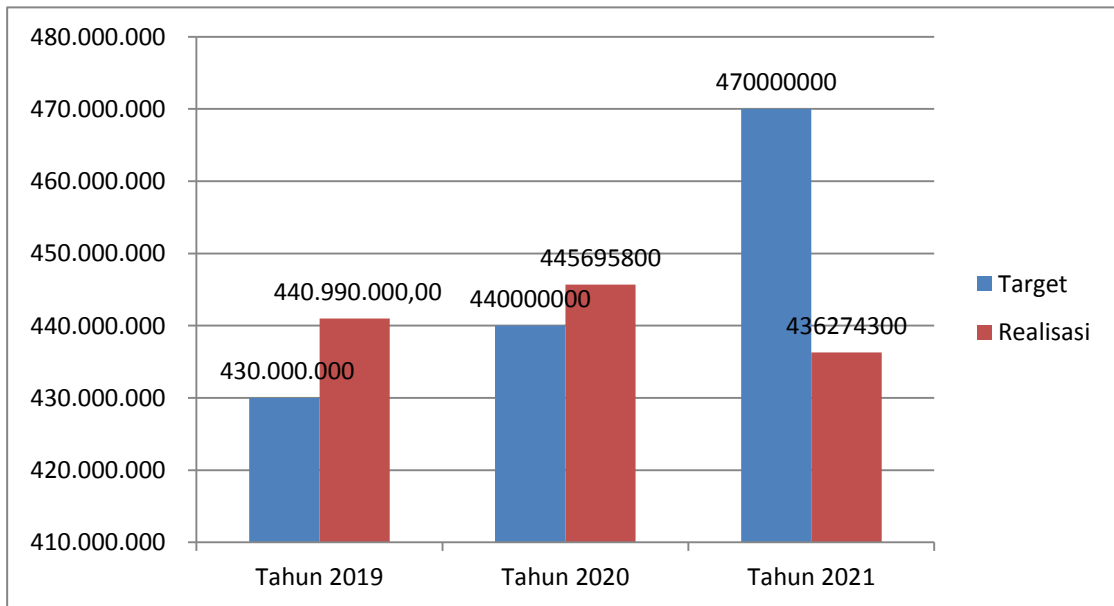
Pengadaan Benih Dan Pakan POKMASWAS

Tabel 3.4. Program dan kegiatan yang mendukung produksi tangkap

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.024.000	282.479.499	97,40	100
	1) Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.100.000	7.085.000	99,79	100
	2) Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap	224.230.000	216.914.000	96,74	100
	3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	58.694.000	58.480.499	99,64	100
	JUMLAH	290.024.000	282.479.499	96,49	100

c. Produksi Benih Ikan

Produksi benih ikan yang dihasilkan pada tahun 2021 belum mencapai target produksi yaitu target 470.000.000 ekor dengan realiasi 436.274.300 ekor. Terjadi penurunan produksi Benih Ikan pada tahun 2021 seperti yang terlihat pada diagram berikut ini



Gambar 3.5. Grafik Produksi Benih Ikan (Ekor/ Tahun)

Dari Grafik dapat dilihat adanya peningkatan produksi benih dari tahun 2019 ke tahun 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021. Hal ini ini disebabkan disebabkan karena kurangnya induk ikan dan tingginya tingkat kematian benih di tingkat pendederan yang disebabkan oleh faktor perubahan lingkungan dan penyakit. Untuk menghasilkan benih ikan yang berkualitas Pada tahun 2021 Dinas Perikanan sudah memberikan calon induk ikan nila, lele, gurami dan mas untuk Unit Pembenihan Rakyat. Selain itu juga Pengembangan Balai Benih Ikan.

Gambar 3.6. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Benih





Penebaran benih ikan nila di Pokdakan Harapan Jaya Harau

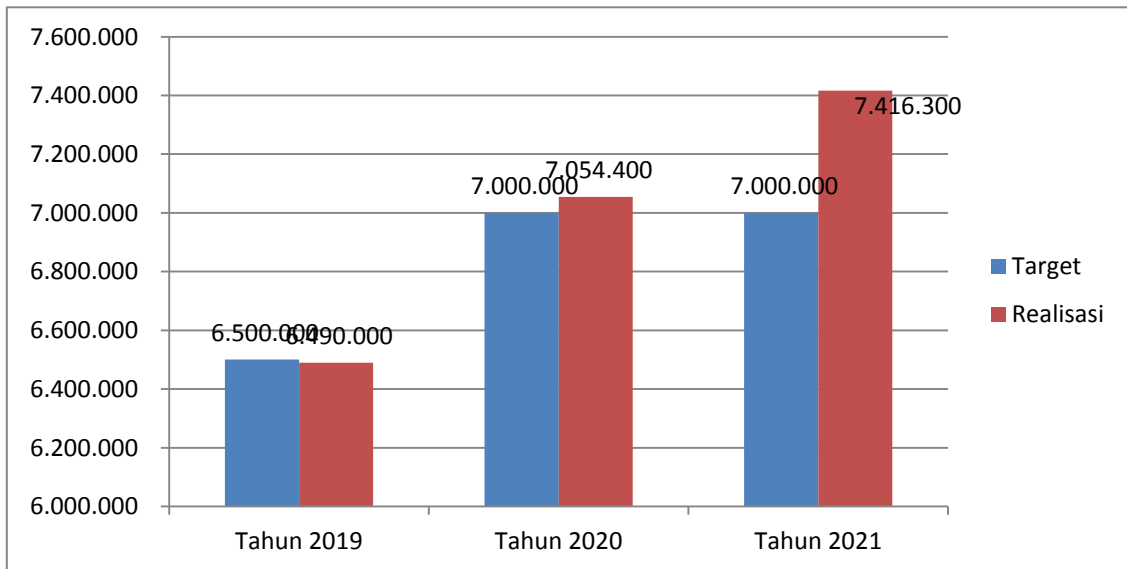
Tabel 3.5. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi Benih Ikan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100
	1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	900.363.100	897.811.425	99,72	100
	2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	547.421.700	542.790.320	99,15	100
	3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	5.786.900	5.786.900	100	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu				
4)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.523.725	42.154.150	99,13	100
5)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.400.000	13.400.000	100	100
6)	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.263.628.300	1.172.890.051	92,82	100
7)	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	46.701.800	45.981.800	98,46	100
	JUMLAH	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100

d. Produksi Ikan hias

Produksi benih ikan hias yang dihasilkan sudah melebihi target produksi yaitu target 7.000.000 ekor dengan realiasi 7.416.300 ekor. Ikan hias yang dihasilkan di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Unit Pembenihan Rakyat dan Hactery Ikan Hias yang di bangun oleh Dinas Perikanan. Jenis ikan hias yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Ikan Koi, Mas Koki, Ikan Komet, ikan cupang, sepat biru, black molly dan manfish



Gambar 3.7. Grafik Produksi Ikan Hias (Ekor /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat di lihat terjadi peningkatan Produksi Ikan Hias setiap tahunnya mulai dari Tahun 2019 s.d 2021. Untuk mendukung peningkatan produksi ikan hias Dinas Perikanan melakukan pengadaan Calon Induk Ikan Hias untuk UPR dan Hactery Ikan Hias.

Gambar 3.8. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung Produksi Ikan hias





Penebaran calon induk ikan hias di Nagari Mungo, Kecamatan Luak
Tabel 3.6. Program dan Kegiatan yang mendukung Produksi ikan hias

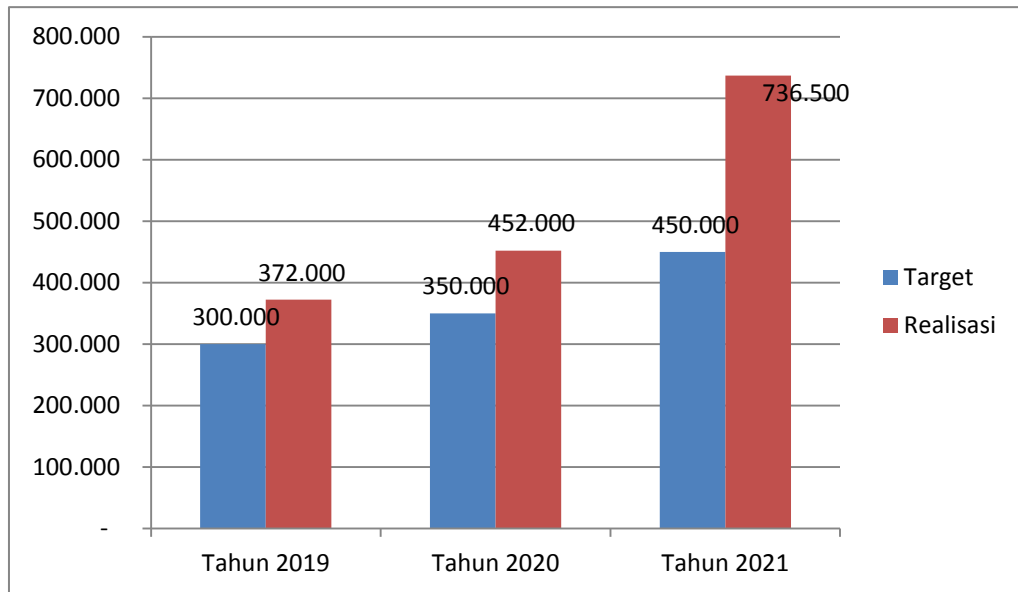
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100
	1) Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	900.363.100	897.811.425	99,72	100
	2) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	547.421.700	542.790.320	99,15	100
	3) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	5.786.900	5.786.900	100	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu				
4)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.523.725	42.154.150	99,13	100
5)	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.400.000	13.400.000	100	100
6)	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.263.628.300	1.172.890.051	92,82	100
7)	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	46.701.800	45.981.800	98,46	100
	JUMLAH	2.819.825.525	2.720.814.646	96,49	100

e. Produksi Produk Unggulan Daerah

Produksi Produk Unggulan Daerah adalah ikan gurami sago. Ikan Gurami Sago sudah di rilis oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dan sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/ Kepmen-KP/2017 tentang Pelepasan Ikan Gurami Sago. Pada Tahun 2017 Ikan Gurami Sago sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu Produk Unggulan Daerah.

Produksi Ikan Gurami Sago meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2021 dengan target produksi 450.000ekor dengan realisasi jauh melebihi target 736.500 ekor. Produksi Gurami Sago dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Gambar 3.9. Grafik Produksi Produk Unggulan Daerah (ekor)

Dari grafik di atas dapat dilihat adanya peningkatan produksi setiap tahunnya. Untuk meningkatkan produksi Ikan gurami sago Dinas Perikanan sudah memberikan bantuan calon induk Gurami Sago kepada Kelompok Kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) setiap tahunnya.

Gambar 3.10. Dokumentasi Kegiatan mendukung produksi Gurami Sago



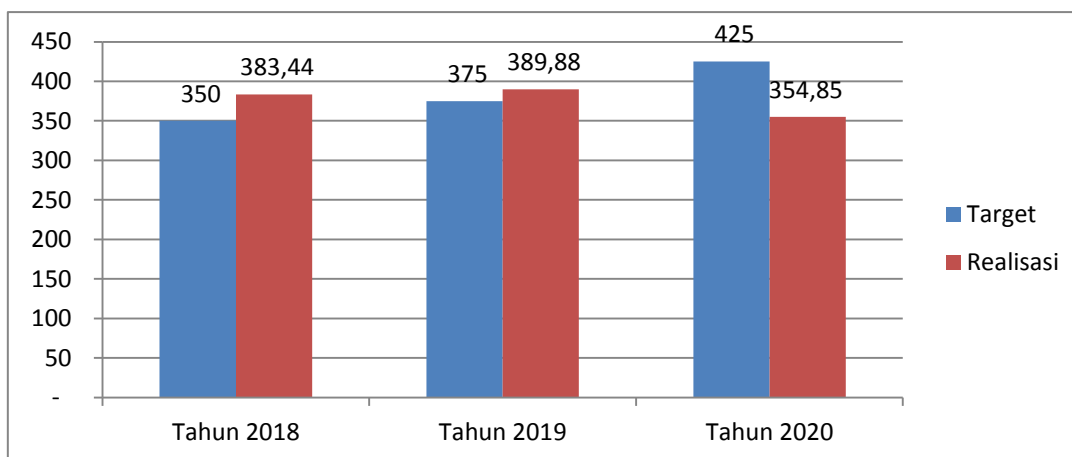
Pengadaan Calon Induk Ikan Gurami Sago

Tabel 3.7. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi produk unggulan daerah

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	5.786.900	5.786.900	100	100
	1) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	5.786.900	5.786.900	100	100
	JUMLAH	5.786.900	5.786.900	100	100

f. Produksi hasil olahan

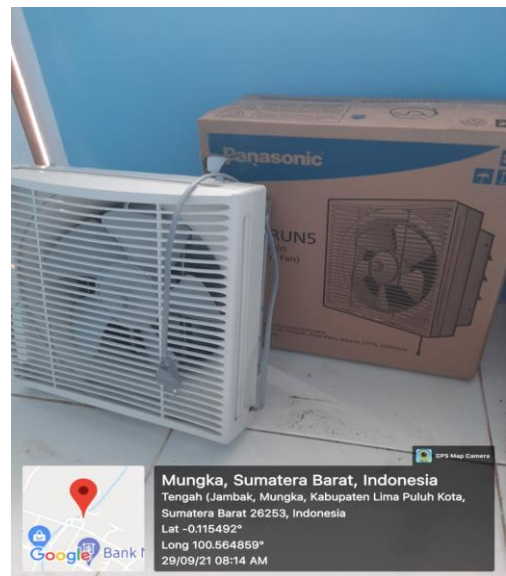
Produksi olahan hasil perikanan Tahun 2021 adalah 348,385 ton dengan target 425 ton. Dibandingkan Tahun 2020 dengan realisasi 389,88 ton terjadi penurunan produksi. Produksi olahan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Gambar 3.11. Grafik Produksi Hasil Olahan(Ton/ Tahun)

Dari Grafik di atas dapat dilihat terjadi peningkatan produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020, dan terjadi penurunan produksi pada tahun 2021. Penurunan produksi ini disebabkan karena pengaruh Pandemi Covid 19. Daya beli masyarakat makin menurun. Untuk meningkatkan promosi produk hasil olahan ikan, Dinas Perikanan sudah berupaya memberikan bantuan berupa pembangunan kios mini untuk pemasaran ikan dan produk hasil perikanan.

Gambar 3.12. Dokumentasi Kegiatan mendukung Produksi Olahan Hasil Perikanan



Bantuan pembangunan Kios Mini pemasaran hasil perikanan beserta sarana



Ikan Patin Asap



Abon Bayi ikan Gurami Sago

Follow akun resmi Tom Burger :
www.tomburgerindonesia.com
 Tom Burger Group
 @tomburgerindonesia

TOMEZ FOOD
"Healthy food is better"

Bak digunakan sebelum
 Kode Produk:

Prodiuser oleh :
 Tom Burger Group
 Kabupaten Tembunguh Kota 26271
 Sumatera Barat-Indonesia

Siomay Tuna
 Siomay Ikan Tuna

TOMEZ FOOD
"Healthy food is better"

Berat bersih 220 gram

SIMPAN DALAM SUHU -18°C

SIEMEN
 100% BAKAR
 PABT 1000-0000000000000

Komposisi :
 Ikan tuna, tapioka, kulit pangsit,
 air, bawang merah, bawang putih, garam,
 merica, dan bumbu kacang

Petunjuk penyajian :
 1. Simpan siomay tuna dalam suhu -18°C.
 2. Buka kemasan siomay tuna
 3. Siomay tuna siap untuk digoreng, dan direbus/dikukus
 4. Panaskan air untuk bumbu kacang

Siomay Ikan Tuna

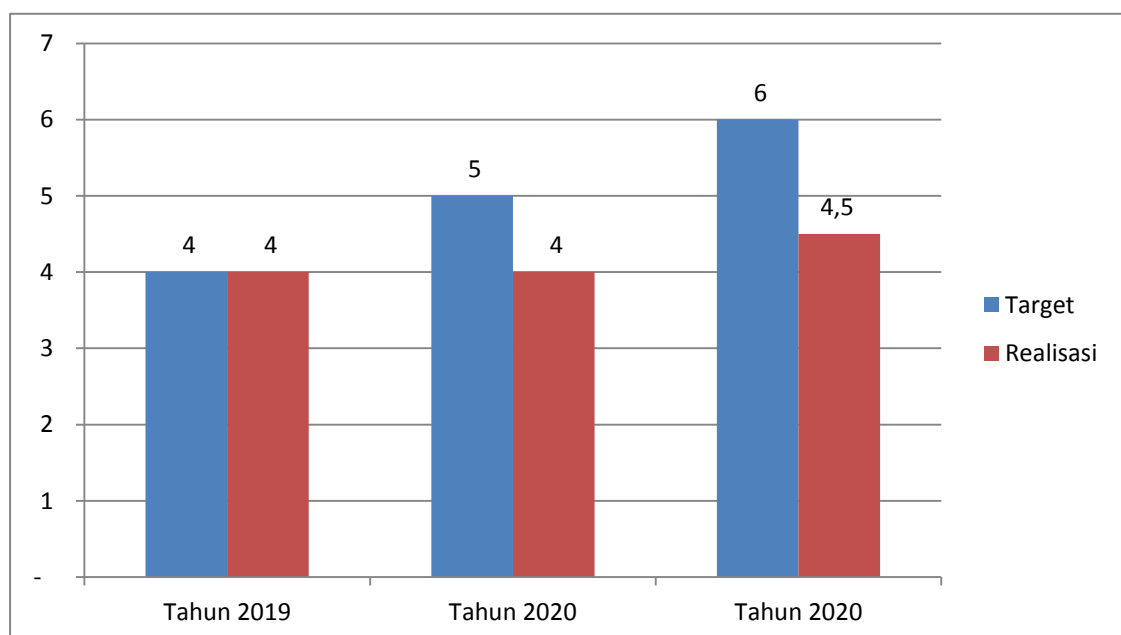
Tabel 3.8. Program dan Kegiatan yang mendukung produksi hasil olahan perikanan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	72.955.200	72.035.898	98,74	100
	1) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.955.200	72.035.898	98,74	100
	- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.315.000	22.525.000	96,61	100
	2) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.315.000	22.525.000	96,61	100
	- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	608.394.000	603.076.239	99,13	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				
	3) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.200.000	364.073.139	99,42	100
	4) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.194.000	239.003.100	98,68	100
	JUMLAH	704.664.200	697.637.137	99	100

g. Tingkat Produktifitas Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Produktifitas Perikanan Budidaya tahun 2021 tidak mencapai target yaitu 4,5 ton/Ha, dari Target 6 ton/Ha. Peningkatan Produktifitas didukung oleh kegiatan Ektensifikasi dan Intensifikasi . Tingkat produktifitas dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.13. Tingkat Produktifitas Perikanan (Ton/ Tahun)

Untuk meningkatkan produktifitas dilakukan dengan cara Extensifikasi dan Intensifikasi. Kegiatan Ektensifikasi Pada tahun 2021 dengan Pemanfaatan Escavator untuk membuka Lahan Baru. Pada Tahun 2021 terjadi Penambahan Lahan Baru yaitu 7,4 Ha. Selain dari Anggaran APBD Dinas Perikanan juga dengan memanfaatkan dana BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) untuk kegiatan Perikanan.

Untuk kegiatan Intensifikasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap pembudidaya ikan untuk melaksanakan kegiatan perikanan dari sistem tradisional menjadi intensif dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kegiatan intensifikasi seperti demplot percontohan, Penerapan CPIB (Cara pembenihan Ikan yang baik) dan CBIB (Cara Budidaya ikan yang baik) kepada Pembudidaya ikan, melaksanakan revitalisasi kolam pembudidaya ikan serta keramba jaring apung, keramba sungai, Minapadi, Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) sehingga bisa menekan harga Pakan ikan dan Menekan penyakit ikan.

Gambar 3.14. Dokumentasi Kegiatan yang mendukung peningkatan produktifitas perikanan



Extensifikasi kolam baru dengan memanfaatkan escavator



Tabel 3.9. Program dan Kegiatan yang mendukung Tingkat Produktivitas Perikanan

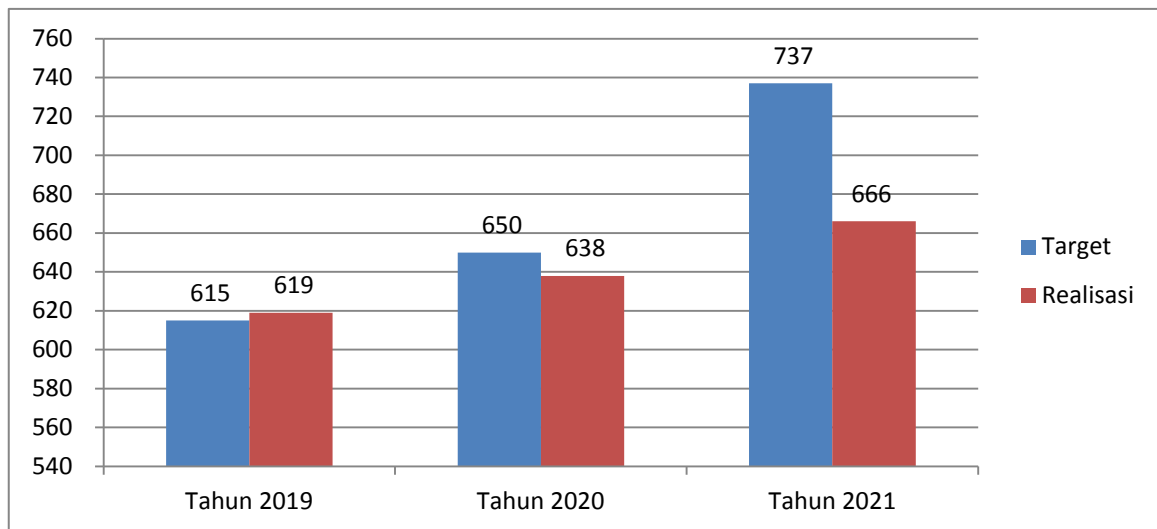
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	72.955.200	72.035.898	98,74	100
	5) Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.955.200	72.035.898	98,74	100
	- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.315.000	22.525.000	96,61	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	6) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.315.000	22.525.000	96,61	100
	- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	608.394.000	603.076.239	99,13	100
	7) Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.200.000	364.073.139	99,42	100
	8) Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.194.000	239.003.100	98,68	100
	JUMLAH	704.664.200	697.637.137	99	100

h. Jumlah kelompok Perikanan

Tingkat capaian indikator kinerja Jumlah Kelompok Perikanan pada Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu 666 kelompok, dari Target 737 kelompok. Kelompok tersebut terdiri dari Pokdakan, Pokmaswas,

Poklahsar dan KUB. Peningkatan jumlah kelompok perikanan dapat dilihat dari grafik di bawah ini :



Gambar 3.15. Jumlah Kelompok perikanan (Kelompok /Tahun)

Dari Grafik diatas dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah kelompok perikanan setiap tahunnya mulai dari tahun 2019-2021. Meskipun realisasi tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Kelompok Pembudidaya ikan (Pokdakan) adalah: Kumpulan para pembudidaya ikan yang terbentuk dan tumbuh atas dasar adanya kepentingan bersama dengan rasa saling percaya, keserasian dan keakraban untuk bekerjasama dalam rangka memanfaatkan sumberdaya, mengembangkan usaha, dana, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Pokdakan di Kabupaten Lima puluh kota tersebar di seluruh Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sampai akhir tahun 2021 Pokdakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 566 kelompok. Kegiatan yang di lakukan oleh Pokdakan adalah usaha pembesaran dan pembenihan ikan.

Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas) adalah Sekelompok masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya. Pokmaswas ini tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota . Jumlah Pokmaswas yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak sampai tahun 2021 adalah 60 Kelompok. Pokmaswas tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil perikanan (Poklahsar) adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok. Poklahsar yang sudah terdaftar sebanyak 24 Kelompok. Poklahsar baru ada di Kecamatan Harau, Payakumbuh, Mungka, Pangkalan, Kapur IX, Guguk dan Suliki. Kegiatan yang dilakukan oleh Poklahsar adalah Pengolahan ikan Asap, Bakso Ikan, Peyek Ikan, Nugget, Burger Ikan, Dendeng Ikan, Pizza Ikan, Sosis Ikan dan Tahu Tuna.

Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah badan usaha non badan hukum yang berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan hasil kesepakatan/musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. KUB yang sudah terdaftar terdapat di sekitar waduk PLTA Koto Panjang Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Kegiatan yang dilakukan oleh KUB adalah melaksanakan penangkapan ikan di Perairan Umum (Waduk PLTA Koto Panjang). Sampai akhir tahun 2021 terdapat 16 KUB yang terdaftar pada Dinas Perikanan. Pada Tahun 2019 Nelayan yang tergabung dalam KUB sudah mendapatkan Kartu Asuransi Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Untuk mendukung peningkatan jumlah kelompok perikanan, Dinas Perikanan melakukan Pembinaan baik oleh Penyuluh Perikanan maupun aparatur Dinas perikanan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan teknis. Selain itu penyaluran bantuan dilakukan kepada kelompok bukan perorangan.

Gambar 3.16. Kegiatan yang mendukung peningkatan kelompok perikanan



Tabel 3.10. Program dan Kegiatan yang mendukung Jumlah Kelompok Perikanan

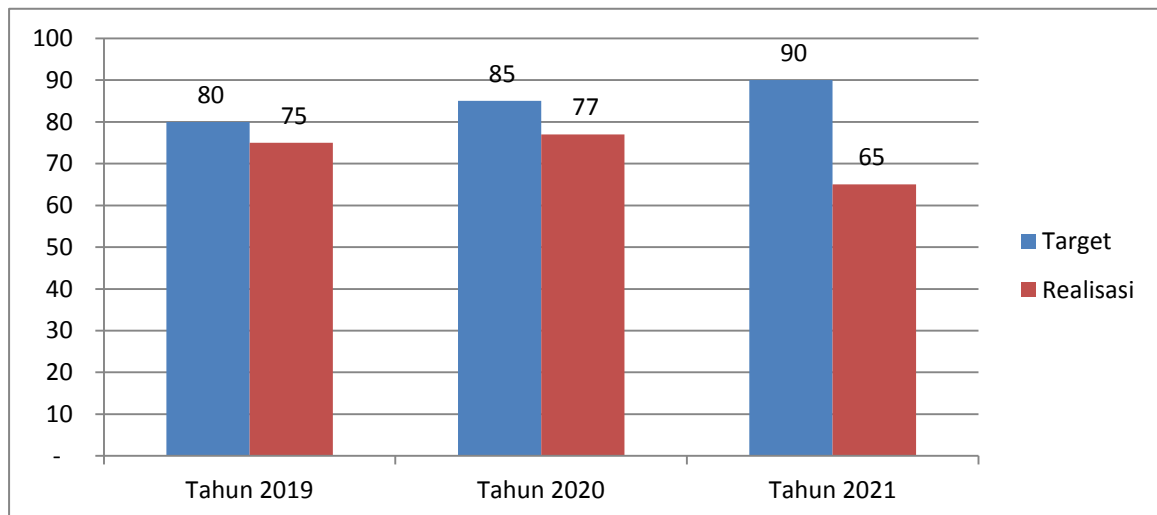
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap - Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.735.200	21.555.200	99,17	100
1)	Pengembangan Kapasitas Nelayan	860.000	710.000	82,56	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Kecil				
2)	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.875.200	20.845.200	99,86	100
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	393.068.000	381.794.540	97,13	100
3)	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25.592.000	19.622.000	76,67	100
4)	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.756.500	32.082.500	89,72	92
5)	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	300.090.000	299.005.540	99,64	100
6)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	31.629.500	31.084.500	98,28	100
	JUMLAH	414.803.200	403.349.740	96,49	98,67

i. Cakupan Bina Kelompok Perikanan

Untuk indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Perikanan Tahun 2021 tidak mencapai target yaitu dari target 90 % tercapai 65 %. Cakupan Bina Kelompok Perikanan adalah persentase kelompok perikanan yang tersentuh oleh program pemerintah baik dana APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus APBD Provinsi. Selain tersentuh oleh bantuan pemerintah juga dilakukan pembinaan, monitoring dan Evaluasi secara teknis oleh Aparatur Dinas Perikanan dan Penyuluh Perikanan.

Pada Tahun 2020 Badan Riset Sumberdaya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menetapkan salah satu kelompok yaitu kelompok Anak Kociak di Nagari Suliki Kecamatan Suliki sebagai percontohan Desa Inovasi dengan komoditas gurame, udang galah, koi, probiotik dan maggot



Gambar 3.17. Persentase cakupan bina kelompok

Dari grafik diatas, dapat dilihat terjadi penurunan cakupan bina kelompok dari tahun 2020 ke tahun 2021. Untuk pencapaian setiap tahunnya belum mencapai target.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan adalah menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) seperti bantuan benih dan pakan, bantuan calon induk ikan, revitalisasi kolam rakyat, pengembangan keramba jaring apung, pengembangan keramba sungai, Minapadi, Bantuan saran dan prasarana, Gerakan pakan ikan mandiri. Bantuan yang disalurkan kepada Kelompok Masyarakat pengawas adalah Pengadaan benih dan pakan untuk lubang larangan, pembangunan

shelter, pembangunan pos jaga, pembangunan kolam pembenihan ikan langka. Bantuan yang disalurkan kepada kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) adalah Pembangunan kios mini pemasaran, pembangunan los pasar ikan, pembangunan bangsal pengolahan, pengadaan alat alat pengolahan, pengadaan alat alat pemasaran. Sedangkan bantuan yang disalurkan kepada Kelompok usaha bersama (KUB) adalah bantuan perahu, bantuan alat tangkap, asuransi nelayan. Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak Dinas Perikanan berdiri tahun 2008. Bantuan yang sudah disalurkan tersebut ada yang berkembang dan ada juga yang tidak berkembang.

Gambar 3.18. Dokumentasi kegiatan Cakupan Bina Kelompok Perikanan





Tabel 3.11. Program dan Kegiatan yang mendukung cakupan bina kelompok

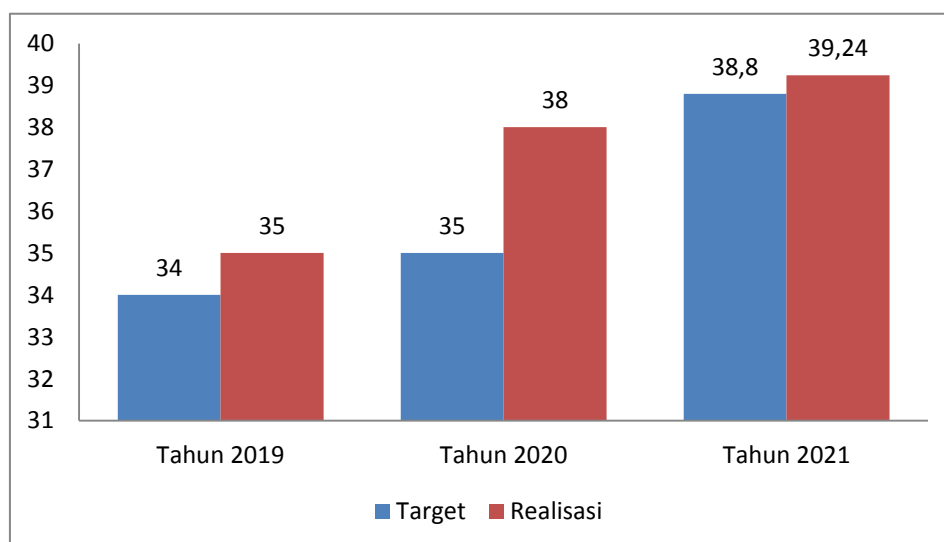
No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap				
	- Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	1) Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap	224.230.000	216.914.000	96,74	100
	2) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	58.694.000	58.480.499	99,64	100
	- Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.735.200	21.555.200	99,17	100
	1) Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	860.000	710.000	82,56	100
	2) Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.875.200	20.845.200	99,86	100
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				
	- Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	393.068.000	381.794.540	97,13	100
	3) Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25.592.000	19.622.000	76,67	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	4) Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.756.500	32.082.500	89,72	92
	5) Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	300.090.000	299.005.540	99,64	100
	6) Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	31.629.500	31.084.500	98,28	100
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				
	7) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	547.421.700	542.790.320	99,15	100
	8) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan perikanan budidaya terpadu	5.786.900	5.786.900	100	100
	9) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	42.523.725	42.154.150	99,13	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	10)Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.400.000	13.400.000	100	100
	11)Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.263.628.300	1.172.890.051	92,82	100
	12)Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	46.701.800	45.981.800	98,46	100
	JUMLAH	2.617.189.625	2.501.747.460	95,58	99,42

j. Tingkat Konsumsi Makan Ikan :

Indikator kinerja tingkat konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 sudah melebihi target yaitu 38,5 Kg/kapita/tahun dengan realisasi 39,24 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi makan ikan meningkat setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini :



Gambar 3.19. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)

Dari Grafik diatas terlihat tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat setiap tahunnya dan sudah melebihi target yang sudah ditentukan.

Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan untuk meningkatkan tingkat konsumsi makan ikan membuat diservikasi produk perikanan seperti seperti bakso ikan, nugget, pizza ikan, peyek ikan, Sozzis Ikan, otak otak ikan. Selain itu dalam upaya meningkatkan konsumsi ikan dan memasyarakatkan makan ikan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota juga melakukan upaya seperti kegiatan Promosi lewat Baliho, Kegiatan Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) mulai dari tingkat Nagari dan lomba-lomba masak serba ikan.

Gambar 3.20. Kegiatan yang mendukung Peningkatan Konsumsi



Baliho Gemarikan Makan Ikan



Banner Gemar Ikan

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Dinas Perikanan **OMEGA - 3**

TEMUKAN MANFAAT SEHAT DENGAN MAKAN IKAN

KEPALA & MATA

Pada kepala & mata ikan mengandung Polyscharida yang berfungsi mengontrol aliran darah.

PERUT

Lemak pada perut ikan mengandung lemak omega-3 (EPA) yang berfungsi mencegah penyempitan pembuluh darah dan dapat menurunkan kolesterol.

DAGING

Daging ikan mengandung Protein berkelas tinggi dan Vitamin yang sangat berguna untuk pertumbuhan dan ketahanan tubuh.

MINYAK IKAN

Minyak ikan mengandung DHA (Decosa Hexanoic Acid) yang sangat penting dalam pertumbuhan serta perkembangan otak.

KULIT

Kulit ikan mengandung Vitamin A & B2 yang sangat bermanfaat untuk kesehatan mata dan ketahanan tubuh.

IKAN MERUPAKAN SUMBER PANGAN YANG KOMPLEKS KARENA DI DALAM TUBUH IKAN BANYAK TERKANDUNG ZAT GIZI YANG BERMANFAAT BAGI TUBUH SEPERTI PROTEIN, LEMAK, VITAMIN DAN MINERAL.

Salah satu zat yang mempunyai manfaat sangat besar bagi tubuh adalah senyawa asam lemak tak jenuh ECOSA PENTANOIC ACID (EPA) DAN DECOSA HEXANOIC ACID (DHA) (OMEGA-3 & OMEGA-6) YANG SANGAT ESENSIAL BAGI TUBUH.

MANFAAT (EPA) DAN (DHA) BAGI TUBUH ADALAH:

- MENINGKATKAN PERKEMBANGAN DAN VOLUME OTAK (UNTUK MENINGKATKAN KECERDASAN DAN DAYA INGAT)
- MENGURANGI RISIKO SERANGAN JANTUNG KORONER
- MENINGKATKAN PERTUMBUHAN ETINA MATA (MENJAGA RETAJAMAN PENGLIHATAN)
- MENINGKATKAN ELASTISITAS DAN PERSENDIAN (ENGURANGI PEGAL PEGAL DAN RASA KAKU PERSENDIAN)

KANDUNGAN GIZI	KARAKTERISTIK DAN FUNGSI
<p>Protein : 18-20</p> <p>Lemak : 1 – 20 %</p> <p>Kalori Rendah</p> <p>Vitamin A</p> <p>Vitamin D</p> <p>Vitamin B1, B3, B6, B12, dan Biotin</p> <p>Yodium, Flour, Selenium, Zat besi dan Kalsium</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas tinggi terutama Asam Amino Lysine dan Treonine - Tidak rusak oleh pemasasan - Penyerapannya lebih banyak dibandingkan dengan daging ayam dan sapi - Omega-3- - Untuk pertumbuhan dan perkembangan otak atau kecerdasan - Untuk penglihatan - Untuk pencegahan penyakit jantung, kencing manis, reumatik, asthma, Penyakit kulit dan kanker - Cocok untuk diet. - Untuk Kesehatan mata. - Untuk Kesehatan tulang dan gigi serta penyerapan kalsium dan fosfor. - Untuk metabolisme dan tumbuh kembang anak. - Pembentukan hormon tiroid, mencegah gondok, kesehatan gigi, mencegah penuaan dini, mencegah amenia serta pertumbuhan tulang dan gigi.

Dinas Perikanan
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Poster Gemar Ikan



Pembagian hadiah lomba masak serba ikan

Tabel 3.12. Program dan Kegiatan yang mendukung tingkat konsumsi ikan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
1)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				
	- Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	72.955.200	72.035.898	98,74	100
9)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.955.200	72.035.898	98,74	100
	- Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.315.000	22.525.000	96,61	100
10)	Pelaksanaan Bimbingan dan	23.315.000	22.525.000	96,61	100

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	% Keuangan	% Fisik
	Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	- Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	608.394.000	603.076.239	99,13	100
	11)Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.200.000	364.073.139	99,42	100
	12)Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.194.000	239.003.100	98,68	100
	JUMLAH	704.664.200	697.637.137	99	100

2) Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2

SASARAN STRATEGIS 2 :							
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERIKANAN							
NO	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realiasi 2019	Target 2020	Realiasi 2020
1	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	65	64,62	70	69,14	75	67,79

a. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Tahun 2021 Dinas Perikanan merupakan salah satu OPD Sampel SAKIP Lima Puluh Kota. Nilai SAKIP Dinas Perikanan yang di evaluasi oleh Inspektorat adalah SAKIP Tahun 2020. Dari hasil evaluasi Inspektorat tersebut SAKIP Dinas Perikanan mendapat nilai 67,79 dengan kategori B dengan pengertian Baik. Akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,31

- 1) Untuk Komponen Perencanaan Kinerja Khususnya dokumen perencanaan strategis, Dinas Perikanan telah memiliki dokumen Renstra Tahun 2016-2021 yang telah memuat tujuan, indikator tujuan, Sasaran, indikator sasaran dan dilengkapi dengan ukuran keberhasilan beserta targetnya, namun tujuan dalam renstra hanya memiliki 1 indikator tujuan dan masih ada sasaran yang hanya dilengkapi dengan 1 indikator sasaran.
- 2) Target jangka menengah dalam renstra belum sepenuhnya dimonitor
- 3) Untuk Perencanaan Kinerja telah disusun dan telah menyajikan IKU dan telah dipublikasikan. Sasaran juga telah berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik
- 4) Rencana aksi telah disusun dan mencantumkan target secara periodic atas kinerja namun belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam penyusunan anggaran.

- 5) Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran
- 6) Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala
- 7) Renstra belum direvie secara berkala
- 8) Renstra atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala

Tanggapan : - Perencanaan kinerja sudah diperbaiki dengan adanya revisi renstra Tahun 2016 s.d 2021
 - Sudah dilakukan Coaching oleh Kementrian PAN dan RB

B. Pengukuran Kinerja dengan nilai 14,69

- 1) Untuk komponen pengukuran kinerja ini, Dinas Perikanan telah mempunyai Indicator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara Formal namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang dan IKU belum direviu secara berkala
- 2) Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala
- 3) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi
- 4) IKU belum dimanfaatkan penilaian kerja, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- 5) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas belum dikaitkan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan punishment

Tanggapan : Pengukuran kinerja sudah lebih dioptimalkan pemanfaatannya didalam dokumen perencanaan

C. Pelaporan Kinerja dengan nilai 10,42

- 1) Laporan kinerja masih hanya berupa info tentang upaya efisien yang dilakukan

- 2) Informasi disajikan dalam laporan kinerja belum dapat sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi

Tanggapan : Pelaporan kinerja sudah sudah dioptimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

D. Evaluasi Internal dengan nilai 6,95

- 1) Evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan dan kegagalan program
- 2) Pemantauan rencana aksi belum dilakukan secara bulanan dan belum terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikanan
- 3) Hasil Evaluasi Rencana aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Tanggapan : Rencana aksi sudah dipantau setiap triwulan dan dilaporkan realisasinya

E. Pencapaian Sasaran / Kinerja organisasi dengan nilai 14,43

- 1) Beberapa target kinerja tercapai dengan baik
- 2) Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya

Tanggapan : Target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya lebih diprioritaskan tahun berikutnya.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah di tetapkan , Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.324.604.310	7.143.035.577	97.52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.090.309.385	3.033.776.555	98.17
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69.672.200	69.041.800	99.10
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.725.700	13.392.500	97.57
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.636.000	3.572.000	98.24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.651.000	3.643.000	99.78
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000	2.977.000	99.23
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.575.000	2.575.000	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.396.500	37.324.300	99.81
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.688.000	5.558.000	97.71
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.023.525.285	1.980.321.782	97.86
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.013.469.285	1.970.429.982	97.86
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	973.000	945.000	97.12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.918.000	4.913.800	99.91
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeiksaan ke Luar Daerah	2.091.000	1.966.000	94.02
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.074.000	2.067.000	99.66
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.500.000	60.500.000	100.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6.500.000	6.500.000	100.00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.000.000	54.000.000	100.00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.196.900	266.524.096	98.64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.277.000	1.277.000	100.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.102.400	67.962.200	99.79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.620.000	1.620.000	100.00
Penyediaan Bahan logistik Kantor	6.505.100	6.505.100	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.596.900	25.596.900	100.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.560.000	4.560.000	100.00
Fasilitas Kunjungan Tamu	5.637.500	5.637.500	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.898.000	153.365.396	97.75
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	7.500.000	100.00
Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	100.00
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.509.000	403.773.391	98.12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.096.000	99.81
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.640.000	34.455.359	86.92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	369.769.000	367.222.032	99.31

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	247.406.000	246.115.486	99.48
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.386.000	172.385.050	100.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	20.000.000	20.000.000	100.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.710.000	7.710.000	100.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	47.310.000	46.020.436	97.27
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	311.759.200	304.034.699	97.52
Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	290.024.000	282.479.499	97.40
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	7.100.000	7.085.000	99.79
Penyediaan Prasarana Usaha perikanan Tangkap	224.230.000	216.914.000	96.74
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	58.694.000	58.480.499	99.64
Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.735.200	21.555.200	99.17
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	860.000	710.000	82.56
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	20.875.200	20.845.200	99.86
Program Perikanan Budidaya	3.217.871.525	3.107.587.186	96.57
Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	393.068.000	381.794.540	97.13
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	25.592.000	19.622.000	76.67
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.756.500	32.082.500	89.72
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan Kemitraan Usaha	300.090.000	299.005.540	99.64
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	31.629.500	31.084.500	98.28
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.978.000	4.978.000	100.00
Penetapan Persyaratan dan prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.978.000	4.978.000	100.00
Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.819.825.525	2.720.814.646	96.49
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	900.363.100	897.811.425	99.72
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	547.421.700	542.790.320	99.15
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.786.900	5.786.900	100.00
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.523.725	42.154.150	99.13
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	13.400.000	13.400.000	100.00
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	1.263.628.300	1.172.890.051	92.82
Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	46.701.800	45.981.800	98.46
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	704.664.200	697.637.137	99.00
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	72.955.200	72.035.898	98.74
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	72.955.200	72.035.898	98.74

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4
Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.315.000	22.525.000	96.61
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23.315.000	22.525.000	96.61
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	608.394.000	603.076.239	99.13
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.200.000	364.073.139	99.42
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	242.194.000	239.003.100	98.68

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban *keberhasilan/kegagalan* Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran tahun 2021, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

4.2. Langkah Peningkatan di Masa Datang

Capaian kinerja tersebut baik berhasil maupun tidak berhasil memberikan pelajaran kepada kita untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa akan datang.

Demikian Laporan Instansi Kinerja Pemerintah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 untuk disampaikan sebagai pedoman selanjutnya, semoga dapat bermanfaat.

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Sarilamak, Januari 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Lima Puluh Kota

MOHD. SISWANTO, S.Pi, M.Si

NIP. 19710808 199803 1 004